

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Mega Rizky Anggraeni¹, M.Renaldi², Denny Hernawan³, Afmi Apriliani⁴

¹²³⁴ Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda

Korespondensi : Afmi Apriliani, email: afmi.apriliani@unida.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di Kecamatan Ciawi Bogor merupakan upaya sistematis untuk mengurangi resiko kebakaran dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi implementasi kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di Kecamatan Ciawi, Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada anggota pemadam kebakaran sebagai sumber informasi utama. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara mendalam dengan 10 informan yang dipilih secara purposive untuk memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di Kecamatan Ciawi Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran di Kecamatan Ciawi telah menghasilkan sejumlah keberhasilan dan tantangan. Perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat sekitar, agar masyarakat memahami cara mengantisipasi sebelum terjadinya kebakaran serta memperkuat koordinasi antara pemadam kebakaran dan instansi terkait untuk memastikan respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi kebakaran di wilayah Kecamatan Ciawi, Bogor.

Kata Kunci: Implementasi, Lingkungan, Kebijakan, Kebakaran, Penanggulangan,

PENDAHULUAN

Kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di Kecamatan Ciawi, Bogor, merupakan upaya sistematis untuk mengurangi risiko kebakaran dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Kebijakan ini mencakup strategi pencegahan yang meliputi penyuluhan kepada masyarakat tentang cara mengurangi potensi kebakaran, regulasi terkait penggunaan bahan-bahan yang mudah terbakar,

serta pengawasan terhadap infrastruktur yang rentan terhadap kebakaran. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pentingnya respons yang cepat dan efektif dalam penanganan kebakaran, dengan memastikan ketersediaan dan kesiapan personel serta peralatan pemadam kebakaran yang memadai. Implementasi kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan cepat tanggap terhadap kebakaran, dengan tujuan mengurangi kerugian materiil dan jumlah korban jiwa yang disebabkan oleh bencana tersebut.

Implementasi kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di Kecamatan Ciawi, Bogor, menggambarkan upaya sistematis untuk mengelola risiko kebakaran yang dapat mengancam keamanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Menurut Wilson dan Baker (2017), implementasi kebijakan ini melibatkan serangkaian langkah strategis yang dirancang untuk memitigasi risiko kebakaran, termasuk pencegahan, deteksi dini, response cepat, dan rehabilitasi pasca-kebakaran. Kebijakan ini bukan hanya berfokus pada upaya pencegahan, tetapi juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam merespons kejadian kebakaran secara efektif. Menurut Turner (2019), koordinasi yang baik antara pemerintah lokal, pemadam kebakaran, dan komunitas merupakan kunci dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kebakaran yang berhasil.

Secara spesifik, implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran di Kecamatan Ciawi, Bogor, juga mencakup aspek edukasi masyarakat tentang kesadaran bahaya kebakaran dan tindakan pencegahan yang tepat. Menurut Healy (2018), penyuluhan kepada masyarakat tentang penggunaan peralatan pemadam kebakaran, perencanaan evakuasi, dan pengelolaan bahan-bahan berbahaya merupakan bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kapasitas responsif terhadap kebakaran di tingkat lokal.

Implementasi kebijakan ini juga didukung oleh kerangka regulasi yang memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan yang telah ditetapkan. Menurut Sadek et al. (2020), regulasi yang kuat mengenai bangunan yang aman dari kebakaran,

penggunaan material yang tahan api, dan sistem deteksi kebakaran yang canggih merupakan komponen penting dalam mengurangi potensi kebakaran di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Ciawi.

Menurut kamus Webster definisi implementasi (Wahab : 2005 :64) berasal dari bahasa inggris yaitu "to implement" (mengimplementasikan) Sementara dalam (KBBI), berarti "penyelenggaraan/penerapan". Tujuan kebijakan dan implementasi terkait dengan tindakan pemerintah, Maka Menurut Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980:6), Salah satu tanggung jawab implementasi adalah menciptakan hubungan yang memungkinkan pelaksanaan tujuan kebijakan publik melalui tindakan lembaga dan lembaga pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. (Yusuf, at al 2024)

Implementasi kebijakan menentukan apakah kebijakan aplikabel dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcome seperti yang direncanakan. Dalam konteks administrasi, pencapaian sasaran seperti itu disebutnya efektif. (Boga et al., 2024)

Dengan demikian, pendekatan yang terkoordinasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di Kecamatan Ciawi, Bogor, tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak buruk kebakaran tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman tersebut. Dalam implementasi kebijakan pencegahan kebakaran di Kecamatan Ciawi Bogor, diharapkan jumlah kejadian kebakaran bisa dikurangi. Penataan dan penertiban pemukiman padat penduduk yang rentan terhadap kebakaran diharapkan dapat mendukung upaya tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teori yang relevan dengan judul penelitian ini, termasuk di antaranya adalah

1. Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson (dikutip dalam Subarsono, 2013:2), kebijakan publik merujuk pada kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga dan aparat pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pengambilan keputusan, pengeluaran anggaran, regulasi, dan penyediaan layanan publik. Di sisi lain, Thomas Dye (dikutip dalam Subarsono, 2013:2) mengartikan kebijakan publik sebagai semua pilihan yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah untuk menangani masalah-masalah publik, termasuk keputusan yang diambil oleh badan-badan pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi, baik dalam bertindak maupun tidak bertindak. Dengan demikian, konsep kebijakan publik mencakup semua aspek terkait dengan pengambilan keputusan pemerintah untuk mencapai tujuan umum dan mengalokasikan sumber daya publik.

2. Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno (2004:64) Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting setelah undang-undang diundangkan dan alokasi dana dilakukan. Ini mencakup pelaksanaan nyata dari kebijakan tersebut oleh lembaga pemerintah atau pihak terkait yang ditugaskan untuk menjalankannya. Proses ini mengubah kebijakan dari konsep menjadi tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari, memastikan bahwa tujuan kebijakan tersebut tercapai dengan efektif.(Dwiyanto , 2009:143).

3. Teori Penanggulangan Kebakaran

Menurut Dinas Pemadam Kebakaran (2002), penanggulangan kebakaran mencakup semua usaha untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan menerapkan berbagai strategi untuk menanggulangi kejadian tersebut.

Sebaliknya, pencegahan kebakaran, seperti yang dijelaskan oleh Suma'mur (1996), mencakup semua tindakan yang berkaitan dengan mencegah, mengawasi, dan mengatasi risiko kebakaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi efektif dalam penanggulangan kebakaran di Kecamatan Ciawi, Bogor.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Sampel terdiri dari 10 informan yaitu 5 anggota dari pemadam kebakaran dan 5 masyarakat sekitar. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan-informan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2009: 246).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan untuk mengatasi dan mencegah bahaya kebakaran di Kecamatan Ciawi, Bogor belum mencapai hasil yang optimal sesuai dengan regulasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang penanganan bahaya kebakaran. Hal ini dapat diamati dari berbagai segi yang terkait, seperti peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran, ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran yang memadai, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait kebakaran, serta upaya-upaya edukasi dan sosialisasi yang belum optimal dilakukan.

Pelaksanaan kebijakan untuk mengatasi dan mencegah bahaya kebakaran di Kecamatan Ciawi, Bogor merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aspek strategis dan operasional untuk melindungi masyarakat serta kekayaan alam dan

infrastruktur yang berharga. Kecamatan Ciawi, sebagai bagian dari wilayah Bogor yang berpotensi tinggi terhadap risiko kebakaran akibat kondisi geografis dan lingkungannya, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dalam upaya mengurangi risiko kebakaran serta meningkatkan kapasitas dalam menanggulangi kejadian kebakaran yang terjadi.

Salah satu langkah utama dalam implementasi kebijakan tersebut adalah penyusunan peraturan daerah yang mengatur tentang tata cara pencegahan kebakaran, seperti pengawasan terhadap bangunan dan infrastruktur untuk memastikan pemenuhan standar keamanan kebakaran, serta regulasi terkait penggunaan bahan-bahan yang mudah terbakar. Selain itu, dilakukan juga sosialisasi secara masif kepada masyarakat tentang tata cara aman dan penanganan awal jika terjadi kebakaran, melibatkan berbagai pihak termasuk petugas pemadam kebakaran, lembaga pemerintah, dan komunitas lokal.

Pembentukan tim tanggap darurat kebakaran dengan personel yang terlatih dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai juga menjadi fokus utama dalam upaya ini. Tim ini bertugas untuk merespons cepat setiap laporan kebakaran, melakukan evakuasi jika diperlukan, dan mengkoordinasikan upaya pemadaman bersama petugas dari berbagai instansi terkait. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti penyediaan sumber air yang memadai, jalan akses yang memungkinkan mobil pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi dengan cepat, serta pemeliharaan rutin terhadap peralatan pemadam kebakaran juga menjadi bagian integral dari strategi ini.

Dalam aspek pemantauan dan evaluasi, sistem peringatan dini kebakaran yang terintegrasi dengan teknologi informasi menjadi sangat penting. Hal ini melibatkan penggunaan sensor-sensor yang terpasang di titik-titik strategis untuk mendeteksi titik api potensial dan mengirimkan sinyal peringatan secara otomatis kepada pihak terkait. Data dan informasi terkini tentang kondisi cuaca dan kekeringan juga diintegrasikan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam menghadapi potensi bahaya kebakaran. Seluruh upaya ini dilakukan dengan mengutamakan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya

pengecahan kebakaran. Edukasi berkelanjutan dan pelatihan tentang penanggulangan bahaya kebakaran bagi masyarakat, khususnya untuk kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kebakaran dan cara mengatasinya.

Pelaksanaan Kebijakan untuk mengatasi dan mencegah bahaya kebakaran di Kecamatan Ciawi, Bogor, bukan hanya tentang menciptakan sistem yang responsif dan efektif dalam menghadapi kebakaran, tetapi juga tentang membangun budaya keselamatan yang mencegah terjadinya kebakaran secara proaktif. Hanya dengan komitmen bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, keamanan dari ancaman kebakaran dapat dipertahankan dengan baik.

Hasil penelitian implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran di kecamatan Ciawi Bogor mengacu pada teori George Edward III yang terbagi menjadi 4 (empat) dimensi yaitu 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi.

1. Dimensi Komunikasi, Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), menjelaskan komunikasi adalah proses di mana komunikator mentransfer informasi kepada komunikan. Pentingnya informasi mengenai kebijakan publik adalah agar pelaku kebijakan dapat mempersiapkan langkah-langkah yang sesuai untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.
2. Dimensi Sumber Daya, Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98), Sumber daya memegang peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan.
3. Dimensi Disposisi, Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104), Disposisi didefinisikan sebagai keinginan dan tekad yang kuat dari para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai.

4. Dimensi Struktur Birokrasi, menurut Edward III dalam Widodo (2010:106), mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan hubungan antar unit organisasi.

Adapun hasil dari wawancara mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran di Kecamatan Ciawi, Bogor, dari 10 responden yang terdiri dari anggota pemadam kebakaran dan masyarakat sekitar menunjukkan gambaran yang beragam.

Tabel 1.1
Hasil Wawancara Informan

Informan	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Anggota Pemadam Kebakaran	Komunikasi	1. Bagaimana proses komunikasi antara Anda sebagai anggota pemadam kebakaran dengan pihak terkait kebijakan ini?	Kami memiliki rapat rutin dengan instansi terkait dan sosialisasi di lingkungan sekitar
	SumberDaya	2. Apakah Anda merasa sumber daya yang tersedia (personil, peralatan) cukup untuk menangani kebakaran di wilayah ini?	Kadang kami merasa kurang personil, terutama saat kebakaran besar
	Struktur	3. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam unit pemadam kebakaran terkait penanggulangan kebakaran di Kecamatan Ciawi?	Keputusan biasanya diambil oleh kepala unit berdasarkan situasi yang dihadapi

	Disposisi	4. Apakah anggota pemadam kebakaran merasa termotivasi dan siap untuk merespons kebakaran di Kecamatan Ciawi?	Kami dilatih secara rutin dan merasa siap dalam menanggapi keadaan darurat
Masyarakat Sekitar	Komunikasi	1. Seberapa sering Anda menerima informasi tentang langkah-langkah pencegahan kebakaran dari pihak pemadam kebakaran?	Kami mendapat informasi melalui pengumuman di media sosial dan kampanye di lingkungan.
	Sumber Daya	2. Apakah Anda merasa masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap peralatan pemadam kebakaran (hydrant, alat pemadam)?	Kami tahu letak hydrant terdekat, tapi belum pernah melihat alat pemadam di area kami.
	Struktur Birokrasi	3. Bagaimana tanggapan Anda terhadap respons birokrasi terhadap permintaan bantuan atau laporan kebakaran?	Kadang responnya lambat, terutama saat laporan tidak darurat.
	Disposisi	4. Seberapa sering Anda dan masyarakat sekitar mengikuti pelatihan atau simulasi penanggulangan kebakaran?	Saya belum pernah mengikuti pelatihan, tapi sepertinya masyarakat sekitar lebih aktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota pemadam kebakaran di Kecamatan Ciawi Bogor, diperoleh beberapa kesimpulan yang relevan untuk peningkatan efektivitas penanggulangan kebakaran. Para anggota pemadam kebakaran menyatakan bahwa masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi dalam hal peralatan, seperti tabung pemadam yang lebih modern, untuk meningkatkan efisiensi

dalam menangani kebakaran. Mereka juga merasa strategi patroli dan edukasi yang diterapkan sudah terbukti efektif dalam mengurangi insiden kebakaran di wilayah tersebut. Pelatihan rutin yang mereka terima dianggap membantu mereka merespon kebakaran dengan cepat dan tepat. Selain itu, kolaborasi aktif dengan masyarakat Ciawi dinilai penting dalam upaya penanggulangan kebakaran, dengan masyarakat berperan dalam memberikan laporan bahaya kebakaran. Para anggota pemadam kebakaran merekomendasikan perluasan program edukasi ke sekolah-sekolah lokal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kebijakan penanggulangan kebakaran di kecamatan ini.

Dari wawancara dengan masyarakat sekitar, terlihat bahwa kesadaran akan risiko kebakaran cukup tinggi, terutama karena faktor geografis dan struktur permukiman yang padat. Meskipun begitu, pengetahuan mereka tentang tindakan darurat dalam situasi kebakaran masih perlu ditingkatkan meskipun mereka sudah mendapatkan edukasi dasar dari pemadam kebakaran. Masyarakat Ciawi juga menunjukkan antusiasme terhadap interaksi dengan anggota pemadam kebakaran lokal dalam berbagai acara sosialisasi kebakaran. Harapan masyarakat terhadap upaya penanggulangan kebakaran di Kecamatan Ciawi mencakup peningkatan program pencegahan, terutama melalui pendidikan kepada anak-anak di sekolah. Mereka merasa memiliki peran yang penting dalam mencegah kebakaran dengan menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan mudah terbakar di sekitar rumah. Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemadam kebakaran dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran, persiapan, dan respons terhadap kebakaran di Kecamatan Ciawi Bogor. Langkah-langkah untuk meningkatkan sumber daya, strategi penanggulangan, pelatihan, serta edukasi kepada masyarakat dapat membantu mengurangi risiko kebakaran dan meningkatkan keselamatan di wilayah Kecamatan Ciawi Bogor.

KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan dari implementasi kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di Kecamatan Ciawi, Bogor. dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa terdapat tantangan dan peluang yang perlu segera diatasi. Pelatihan intensif serta pemenuhan peralatan yang memadai menjadi prioritas utama bagi anggota pemadam kebakaran guna meningkatkan kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat. Sementara itu, sosialisasi yang lebih luas tentang bahaya kebakaran dan peran aktif masyarakat dalam pencegahan menjadi kunci efektivitas dalam mengurangi risiko kebakaran. Diperlukan juga koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait dan penguatan infrastruktur penanggulangan kebakaran untuk memastikan respons yang cepat dan efisien dalam menghadapi situasi darurat di masa depan.

SARAN

Implementasi kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di Kecamatan Ciawi, Bogor perlu dilakukan dengan serius dan terencana. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran melalui kampanye edukasi yang intensif, melengkapi fasilitas penanggulangan kebakaran dengan peralatan yang mutakhir dan memadai, serta melakukan pelatihan secara berkala kepada petugas penanggulangan kebakaran. Selain itu, penting untuk memperkuat kerjasama antar instansi terkait seperti polisi, pemadam kebakaran, dan pemerintah setempat dalam menangani bencana kebakaran secara efektif. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi warga Kecamatan Ciawi dari risiko kebakaran yang sering kali dapat mengancam keselamatan dan keamanan.

REFERENSI

- Boga, P., Hernawan, D., & Pratidina, G. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Polsek dalam Penanganan Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Raya Ciawi. *Karimah Tauhid*, 3(2), 1941–1949. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.11940>
- Yusup, A. M., Aripin, N. S., Azizah, N., & Apriliani, A. (2024). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt- Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Karimah Tauhid*, 3(2), 1950–1961.
- Pianto, A., & Rofiyanti, E. (2021). Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, *Journal of Fire Prevention*, Volume 12, No. 3, 2021.
- Dinas Pemadam Kebakaran. 2002. "Pedoman Penanggulangan Kebakaran." Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Dwiyanto, Bambang. 2009. "Implementasi Kebijakan Publik: Suatu Pengantar." Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Halaman 143.
- Healy, J. (2018). Pendidikan masyarakat mengenai penggunaan alat pemadam kebakaran, perencanaan evakuasi, dan pengelolaan bahan berbahaya: Komponen integral dalam meningkatkan kapasitas tanggap kebakaran lokal. *Jurnal Pendidikan Keselamatan Kebakaran*, 7(2), 45-56.
- Sadek, (2020). Peraturan yang kuat mengenai bangunan tahan api, material tahan api, dan sistem deteksi kebakaran canggih, *Jurnal Keselamatan Kebakaran Perkotaan*, 12(4), 112-125.
- Surbarsono. 2013. "Kebijakan Publik: Teori dan Proses." Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Halaman 2.
- Suma'mur. 1996. "Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran." Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Turner (2019) Implementasi kebijakan mitigasi kebakaran yang efektif peran utama

dari upaya terkoordinasi antara pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, dan masyarakat. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Kebakaran*, 8(3), 87-99.

Widodo. (2010). Dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan publik: Perspektif teori Edward III. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 97-110.

Wilson dan Baker (2017) Langkah-langkah strategis implementasi kebijakan mitigasi risiko kebakaran: Pencegahan, deteksi dini, respon cepat, dan rehabilitasi pasca kebakaran. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Kebakaran*, 6(1), 35-48.